



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPKNL

TASIKMALAYA

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

TAHUN 2025

PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2025



20 25

JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 19

TASIKMALAYA - 46151

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akHuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tasikmalaya, 4 Mei 2026
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Muthoharul Janan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL.....	3
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
II. NERACA.....	8
III. LAPORAN OPERASIONAL	10
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	12
A. PENJELASAN UMUM.....	12
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	31
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	37
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	52
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	53

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel A.1	: Penggolongan Kualitas Piutang	26
Tabel A.2	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	28
Tabel B.1	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	31
Tabel B.2	: Perbandingan Realisasi Pendapatan s.d. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024	32
Tabel B.3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024	32
Tabel B.4	: Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024	33
Tabel B.5	: Perbandingan Belanja Pegawai s.d. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024	34
Tabel B.6	: Perbandingan Belanja Barang s.d. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024	34
Tabel B.7	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal s.d. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024	35
Tabel B.8	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember TA 2024	35
Tabel B.9	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel C.1	: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	37
Tabel C.2	: Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	38
Tabel C.3	: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas	38
Tabel C.4	: Rincian Pendapatan yang Masih harus Diterima	39
Tabel C.5	: Rincian Persediaan	39
Tabel C.6	: Mutasi Nilai Tanah	40
Tabel C.7	: Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	40
Tabel C.8	: Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan	41
Tabel C.9	: Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41
Tabel C.10	: Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya	42
Tabel C.11	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	42
Tabel C.12	: Mutasi Nilai Aset Lain-Lain	43
Tabel C.13	: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	43
Tabel C.14	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	44
Tabel C.15	: Rincian Utang yang Belum Ditagihkan	44
Tabel C.16	: Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	45
Tabel D.1	: Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan TA 2024	46
Tabel D.2	: Rincian Beban Persediaan	48
Tabel D.3	: Rincian Beban Barang dan Jasa	48
Tabel D.4	: Rincian Beban Pemeliharaan	50
Tabel D.5	: Rincian Beban Perjalanan Dinas	50
Tabel D.6	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	51
Tabel D.7	: Rincian Kegiatan Non Operasional	51



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TASIKMALAYA**

JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 19, TASIKMALAYA 46151
TELEPON: (0265) 342636; FAKSIMILE: (0265) 342636

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tasikmalaya, 4 Mei 2026

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Muthoharul Janan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.514.062.277 atau mencapai 181,53 % dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.037.607.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.133.207.229 atau mencapai 39,91 % dari alokasi anggaran sebesar Rp5.344.727.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.855.638.678 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp662.520.505, Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.191.818.173; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp1.300.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp579.908.551 dan Rp14.275.730.127

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.594.784.637, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp260.814.242,9 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp2.986.642.208. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp818.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.987.460.208.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp14.201.558.476,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp 2.987.460.208.00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp3.038,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar (Rp 2913.291.595,00) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 14.275.730.127,00.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.037.607.000	5.514.062.277	181,53	5.785.603.440
Jumlah Pendapatan		3.037.607.000	5.514.062.277	181,53	5.785.603.440
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	0	0		0
Belanja Barang	B.4	2.464.325.000	2.133.207.229	86,56	2.116.146.284
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasional		2.464.325.000	2.133.207.229	86,56	2.116.146.284
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	0	0		0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	266.874.000	191.868.000	71,89	580.700,000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	2.613.528.000	210.416.000	99,79	792.041.551
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0	0		0
Belanja Modal Lainnya	B.10	0	0		0
Belanja Modal BLU	B.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		2.880.402.000	402,284,000	13,97	1.372.741.551
Jumlah Belanja		5.344.727.000	2.133.207.229	39,91	3.488.887.835

II. NERACA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 September 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	577.651.440,00	17.608.063,00
Kas pada BLU	C.4	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0,00	0,00
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	81.901.360,00	161.000,00
Piutang Bukan Pajak	C.9	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.10	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.11	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR	C.12	0,00	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	0,00	0,00
Persediaan	C.15	2.967.705,00	3.152.736,00
Persediaan Belum diregister	C.16	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		662.520.505,00	20.921.799,00
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.17	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.18	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.19	8.975.545.000,00	8.975.545.000,00
Peralatan dan Mesin	C.20	3.854.823.355,00	4.201.772.991,00
Gedung dan Bangunan	C.21	5.879.702.551,00	5.669.286.551,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.22	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.23	11.800.000,00	11.800.000,00
KDP	C.24	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.25	(4.530.052.733,00)	(4.645.585.505,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.26	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		14.191.818.173,00	14.212.819.037,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.27	0,00	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.28	0,00	0,00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.29	0,00	0,00
Dana Jangka Panjang	C.30	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.31	607.909.780,00	14.016.444,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(606.609.780,00)	(14.016.444,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		14.855.638.678,00	14.233.740.836,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.33	579.708.551,00	32.182.360,00
Utang yang belum ditagihkan	C.34	0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan	C.35	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	200.000,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.38	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		579.908.551,00	32.182.360,00

Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	C.40	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		579.908.551,00	32.182.360,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.41	14.275.730.127,00	14.201.558.476,00
JUMLAH EKUITAS		14.275.730.127,00	14.201.558.476,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.275.730.127,00	14.201.558.476,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 September 2025	30 September 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.594.784.637,00	5.695.388.313,00
Jumlah Pendapatan		5.594.784.637,00	5.695.388.313,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	103.043.586,00	158.501.385,00
Beban Barang & Jasa	D.4	1.036.568.108,00	1.099.409.491,00
Beban Pemeliharaan	D.5	621.776.489,00	474.290.510,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	369.693.682,00	384.804.971,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	477.060.564,00	462.334.396,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.9	0,00	0,00
Jumlah Beban		2.608.142.429,00	2.579.340.753,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		2.986.642.208,00	3.116.047.560,00
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) penjualan aset non-Lancar	D.10	818.000,00	85.338.000,00
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional		818.000,00	85.338.000,00
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		2.987.460.208,00	3.201.385.560,00
Pos Luar Biasa		0,00	0,00
Pendapatan PNB		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
Surplus/Defisit LO		2.987.460.208,00	3.201.385.560,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024
(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 September 2025	30 September 2024
Ekuitas Awal	E.1	14.201.558.476.00	13.285.317.896.00
Surplus/Defisit LO	E.2	2,987,460,208.00	3,201,385,560.00
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0.00	0.00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0.00	0.00
Lain-lain			
Penyesuaian nilai aset	E.3	0.00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0.00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.5	0.00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.6	0.00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.7	0.00	(4,048,125,00)
Koreksi Lain-lain	E.8	3.038.00	0,00
Jumlah Lain-lain		3.048.00	(4.048.125.00)
Transaksi Antar Entitas	E.9	(2.913.291.595,00)	(2.281.096.855,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.10	74.171.651,00	916.240.580,00
Ekuitas Akhir		14.275.730.127,00	14.201.558.476,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrua Pada Laporan Keuangan.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. PMK No. 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.
13. PMK No. 107 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
14. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 29/MK.01/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SAKTI.

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya

KPKNL Tasikmalaya dibentuk dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. KPKNL Tasikmalaya diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tasikmalaya berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan dan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi KPKNL

Tasikmalaya, yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. **Tujuan** yang hendak dicapai oleh KPKNL Tasikmalaya untuk periode 2024-2029 adalah

terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Tasikmalaya telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024, terdapat 7 (tujuh) **sasaran** yang terkait dengan KPKNL Tasikmalaya yaitu :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.

Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* K/L dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari K/L.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel.

Penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di K/L sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya *database* nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

6. Tingkat pendapatan yang optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

7. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh tingkat pelayanan yang andal. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen atau internal DJKN. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN di mata *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan **strategi** yang harus ditempuh oleh KPKNL Tasikmalaya. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Tasikmalaya yang akan ditempuh adalah :

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.

6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
7. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tasikmalaya melaksanakan **program**: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Tasikmalaya untuk mendapatkan suatu hasil.

A.3. Nilai Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tasikmalaya Tahun 2025 adalah 116,30% atau mengalami kenaikan dari nilai NKO Tahun 2024 yang mencapai 116,24%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Kode	IKU	V/C	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)					33.46%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya					111.53%

1a-CP	Indeks integritas	P/L	100	105.29%	105.29%	105.29%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	153.16%	153.16%	120.00%
Customer Perspective (20%)						23.01%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal					110.08%
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100.00 %	121.18%	121.18%	120.00%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100%	92.85%	92.85%	92.85%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	120.68%	120.68%	120.00%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa					120.00%
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	94.84	128.16%	120.00%
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77	99.40	129.09%	120.00%
Internal process (25%)						30.00%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif					120.00%
4a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100.00 %	138.37%	138.37%	120.00%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100.00 %	120.00%	120.00%	120.00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif					120.00%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	150.60%	150.60%	120.00%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	96.08%	137.26%	120.00%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	104.50%	130.63%	120.00%
Learning & Growth Perspective (25%)						29.84%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif					120.00%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100	120.00	120.00%	120.00%
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100	120.00	120.00%	120.00%
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80.00%	98.00%	122.50%	120.00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif					118.03%

7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	116.05	116.05%	116.05%
7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	116.00	145.00%	120.00%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif					120.00%
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	80	96.85	121.06%	120.00%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						116.30%

Capaian Kinerja/Output

Capaian kinerja/output Tahun 2025 tercapai 100,00%. Capaian kinerja/output Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

REALISASI BELANJA DAN CAPAIAN OUTPUT SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

SATKER KPKNL TASIKMALAYA

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OmSPAN)			Keluaran (Data SAKTI)			
				Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi s.d. Bulan ini	
									RVR O	%
1	4796	AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	22,284,000	-	0.00	56	org	56	100.00
2	4796	AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	8,766,000	-	0.00	22	org	22	100.00
3	4796	AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	5,624,000	-	0.00	15	org	15	100.00
4	4798	AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	103,680,000	95,130,351	91.75	50	Srt Kep	50	100.00
5	4798	AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	85,356,000	75,226,000	88.13	500	Srt Kep	500	100.00
6	4798	ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	24,448,000	19,878,000	81.31	205	Rekom	205	100.00
7	4798	BAH.001	Risalah Lelang	12,271,000	12,269,000	99.98	600	dokumen	600	100.00
8	4798	FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	14,592,000	11,313,500	77.53	1	Rekom	1	100.00
9	4798	FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	19,040,000	17,248,000	90.59	2	Rekom	2	100.00
10	4798	FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	42,318,000	20,316,000	48.01	2	Rekom	2	100.00
11	4798	FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	61,992,000	57,280,000	92.40	11	Aset	11	100.00
12	4798	UAE.201	Rekomendasi BMN Berupa	17,706,000	12,277,500	69.34	130	aset	130	100.00

			Tanah yang Disertifikatkan							
13	47 00	EBA.9 69	Layanan Bantuan Hukum	25,344,000	24,127,000	95.20	4	layanan	4	100.00
14	47 01	EBA.0 02	Kerumahtanggaan	72,724,000	60,069,072	82.60	12	layanan	12	100.00
15	47 01	EBA.9 94	Layanan Perkantoran	1,895,888,000	1,705,199,161	89.94	12	layanan	12	100.00
16	47 01	EBB.0 01	Peralatan Fasilitas Perkantoran	210,874,000	139,367,999	66.09	5	unit	5	100.00
17	47 01	EBB.0 02	Kendaraan Bermotor	56,000,000	52,500,001	93.75	2	unit	2	100.00
18	47 01	EBB.0 03	Gedung/Bangunan	2,613,528,000	210,416,000	8.05	220	M2	220	100.00
19	47 02	BMB.0 01	Pembinaan/Edukasi Publik	9,862,000	1,982,200	20.10	30	org	30	100.00
20	47 02	BMB.0 02	Kehumasan	21,024,000	10,734,000	51.06	4	kegiatan	4	100.00
21	47 04	EBA.0 01	Rekomendasi Kepatuhan Internal	21,406,000	10,501,759	49.06	5	kegiatan	5	100.00
			Jumlah	5,344,727,000	2,535,835,543					100.00

Tahun 2025 Satker KPKNL Tasikmalaya memiliki 1 output strategis yaitu Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertifikatkan.

Nilai IKPA, SMART DJA dan PKPA

Nilai capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) baik yaitu 100,00%, nilai capaian Monev Kemenkeu (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran) dan Nilai Kinerja Anggaran masing-masing mencapai 100,00% dan 100,00%.

Nilai capaian IKPA, Monev Kemenkeu (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran)

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
A. Nilai IKPA		100,00
	1 Revisi DIPA	10,00
	2 Deviasi Halaman III DIPA	15,00
	3 Penyerapan Anggaran	20,00
	4 Belanja Kontraktual	10,00
	5 Penyelesaian Tagihan	10,00
	6 Pengelolaan UP dan TUP	10,00
	7 Capaian Output	25,00
	Jumlah	100,00
	Konversi Bobot	100,00
	Nilai setelah pembobotan	100,00
B. Nilai Smart DJA (Kinerja Perencanaan Anggaran)		100,00
	1 Efektivitas/CRO (100,00 dengan bobot 75%)	75,00
	2 Penggunaan SBK (100,00 dengan bobot 10%)	10,00
	3 Efisiensi SBK (100,00 dengan bobot 15%)	15,00
C. Nilai Kinerja Anggaran (50% IKPA + 50% Monev Kemenkeu)		100,00

Pendekatan

Penyusunan

*Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan *Audited* ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Klas I dan bea lelang pegadaian diakui pada saat penetapan pemenang lelang.
 - Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara diakui pada saat diterbitkannya PJPN (Penetapan Jumlah Piutang Negara).
 - Pendapatan jasa lainnya yaitu pendapatan atas biaya Kutipan Risalah Lelang.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel A.1. Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali*

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA yang dilakukan selama periode pelaporan sebanyak sembilan kali.

Realisasi

Pendapatan

Rp5.514.062.277

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.514.062.277 atau mencapai 181,53% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.037.607.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya terdiri atas Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel B.1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2025		
	Target	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	818.000	100,00%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	300.000	100,00%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.395.735.000	4.931.870.455	205,86%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	640.683.000	563.914.922	88,02%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.189.000	13.118.837	1103,35%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	4.040.063	100%
Jumlah	3.037.607.000	5.514.062.277	181,53%

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 4,69% dibandingkan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari pendapatan bea lelang Pejabat Lelang Kelas I dan pendapatan bea lelang pegadaian. Penurunan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel B.2. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	85.338.000	-100%
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.931.870.455	4.987.734.906	-1,13%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	563.914.922	700.260.273	-24,18%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.001.432	-100%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	13.118.837	11.268.829	14,10%
Jumlah	5.508.904.214	5.785.603.440	-4,78%

Realisasi Belanja
Negara
Rp2.535.491.229

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.535.491.229 atau 98,08% dari anggaran belanja sebesar Rp2.585.025.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.173.896.000	2.133.551.543	98,14%
Belanja Modal	411.129.000	402.284.000	97,85%
Total Belanja Kotor	2.585.025.000	2.535.835.543	98,10%
Pengembalian	-	344.314	-
Jumlah	2.585.025.000	2.535.491.229	98,08%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 44.83 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada Tahun Anggaran 2025 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya adanya belanja modal yang pagunya lebih besar dari tahun 2024.

Tabel B.4. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.133.207.229	2.116.146.284	0,81%
Belanja Modal	402.284.000	1.372.741.551	-70,69%
Jumlah	2.535.491.229	3.488.887.835	-27,33%

Belanja Pegawai Rp0

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak ada Realisasi belanja pegawai s.d. periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan Belanja pegawai sudah dilakukan secara terpusat di Kementerian Keuangan.

Tabel B.5. Perbandingan Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Belanja Barang
Rp2.133.207.229

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang sampai dengan s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.133.207.229 dan Rp2.116.146.284. Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,81% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024.

Tabel B.6. Perbandingan Belanja s.d. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	906.674.100	812.925.115	11,53%
Belanja Barang Non Operasional	54.414.700	121.009.260	-55,03%
Belanja Barang Persediaan	102.858.555	158.324.364	-35,03%
Belanja Jasa	77.789.703	164.792.064	-52,80%
Belanja Pemeliharaan	621.776.803	474.290.510	31,10%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	370.037.682	385.742.971	-4,07%
Jumlah Belanja Kotor	2.133.551.543	2.117.084.284	0,78%
Pengembalian Belanja	344.314	938.000	-63,29%
Jumlah Belanja	2.133.207.229	2.116.146.284	0,81%

Belanja Modal
Rp402.284.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp402.284.000 dan Rp1.372.741.551. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 70,69% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan adanya belanja modal untuk penambahan nilai gedung dan bangunan di tahun 2024 yang lebih besar dibanding tahun 2025.

Tabel B.7. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. 31 Desember 2025 dan s.d. 31 Desember 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.868.000	580.700.000	-66,96%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	210.416.000	792.041.551	-73,43%
Jumlah Belanja Kotor	402.284.000	1.372.741.551	-70,69%
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	402.284.000	1.372.741.551	-70,69%

B.5.1 Belanja Modal Peralatan Fasilitas Perkantoran

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp139.367.999 dan Rp216.500.000. mengalami penurunan sebesar 35,63% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 karena adanya penurunan pagu belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2025.

Tabel B.8. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2025 dan s.d. 31 Desember 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Locker	9.198.000	-	100%
Meja Pelayanan	10.309.000	-	100%
AC Standing 3 PK	49.999.999	-	100%
Meja dan Sofa Set	20.750.000	-	100%
Kursi Kerja	11.990.000	45.700.000	(73,76%)
Kursi Tunggu	17.750.000	-	100%
Meja Kayu	6.350.000	-	100%
Mic Wireless	3.996.000	-	100%
Meja Rapat	-	24.000.000	(100%)
AC Split 2 PK	-	66.150.000	(100%)
CCTV	-	14.150.000	(100%)

Brankas	-	10.000.000	(100%)
Sice	9.025.000	13.500.000	(33,15%)
Panel ATS Genset	-	43.000.000	(100%)
Jumlah Belanja	139.367.999	216.500.000	(35,63%)

B.5.2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp52.500.001 dan Rp0. mengalami kenaikan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024. karena pada tahun 2025 KPKNL Tasikmalaya mendapat alokasi pagu untuk belanja kendaraan bermotor sedangkan pada tahun 2024 tidak mendapat alokasi.

Tabel B.8.a. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Kendaraan Bermotor s.d. 31 Desember 2025 dan s.d. 31 Desember 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	52.500.001	43.200.000	21,5%
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	-	321.000.000	(100%)
Jumlah Belanja	52.500.001	364.200.000	(85,6%)

B.5.3 Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2025 adalah dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada alokasi belanja modal perangkat pengolah data dan komunikasi pada tahun 2024 dan 2025.

Tabel B.8.b Perbandingan Realisasi Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi s.d. dan s.d. 31 Desember 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	%
Printer	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.4 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp792.041.551 dan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp210.416.000. Tahun 2025 KPKNL Tasikmalaya menerima pagu anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan berupa Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yang lebih kecil dibanding tahun 2024.

Tabel B.9. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan BangunanTA 2025 danTA 2024

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp210.416.000	Rp792.041.551	(73,43%)
Jumlah Belanja Kotor	Rp210.416.000	Rp792.041.551	(73,43%)
Jumlah Belanja	Rp210.416.000	Rp792.041.551	(73,43%)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel C.1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Uang di Rekening Bank	-	-
Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	-	-
Pembulatan	-	-
Jumlah	-	-

**Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.2. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Rek. No : 010001000618302	-	-
Bank BRI Rek No : 010001000286309	-	-
Jumlah	-	-

**Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp577.651.440**

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp577.651.440 dan Rp17.608.063. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara Penerimaan yang berasal dari Dana Milik BUMN/Swasta/Pihak ketiga lainnya yang belum dipindahbukukan/ditransfer ke pihak yang berhak dan Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.3. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Uang Jaminan Lelang yang belum diambil	577.291.440	5.435.837
Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi	360.000	3.836.226
Hasil Bersih Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi Wajib Milik Kementerian/Lembaga	-	8.336.000
Jumlah	577.651.440	17.608.063

*Pendapatan yang
masih harus diterima
Rp81.901.360*

C.4 Pendapatan yang Masih harus Diterima

Saldo Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp81.901.360 dan Rp161.000. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan dari kinerja yang sudah dilaksanakan sampai dengan periode laporan. namun pendapatan tersebut belum diterima sehingga sampai dengan akhir periode laporan Pendapatan tersebut belum dapat disetorkan oleh Bendahara Penerimaan.

Rincian sumber Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.4. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan yang masih harus diterima	81.901.360	161.000
Jumlah	81.901.360	161.000

*Persediaan
Rp2.967.705*

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.967.705 dan Rp3.152.736. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel C.5. Rincian Persediaan

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	2.967.705	3.152.736
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	2.967.705	3.152.736

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah**Rp8.975.545.000****C.6 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.975.545.000 dan Rp8.975.545.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.6. Mutasi Nilai Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	8.975.545.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Desember 2025	8.975.545.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.6.a Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	800 m2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.870.800.000
2	572 m2	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1.337.622.000
3	2053 m2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.767.123.000
Jumlah			8.975.545.000

Peralatan dan Mesin**Rp3.854.823.355****C.7 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp3.854.823.355 dan Rp4.201.772.991. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel C.7. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	4,201,772,991
Mutasi tambah:	246.943.700
Pembelian	191.868.000
Transfer masuk	55.075.700
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Lain-Lain	-
Penghentian dari penggunaan	593.893.336
Saldo per 31 Desember 2025	3.854.823.355
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.362.822.898)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	492.000.457

Rincian aset peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp5.669.286.551

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp Rp5.669.286.551 dan Rp4.872.245.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.8. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	Rp5.669.286.551
Mutasi tambah:	
Reklas Aset	1.121.899.000
Mutasi kurang:	
Revaluasi BMN	-
Koreksi Pencatatan Nilai	911.483.000
Saldo per 31 Desember 2025	5.879.702.551
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1.472.544.495)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.407.158.056

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan.Jaringan dan
Irigasi Rp0

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi tambah atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan mutasi kurang adalah sebesar Rp0.

Mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi. dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel C.9. Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	-
Mutasi tambah:	
Barang berlebih hasil temuan revaluasi	-
Mutasi kurang:	
Reklas Aset	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp11.800.000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp11.800.000 dan Rp11.800.000. Aset tetap tersebut berupa alat musik dan Lukisan Cat Minyak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap lainnya untuk periode 31 Desember 2025.

Mutasi atas aset tetap ini untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu :

Tabel C.10. Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	11.800.000
Mutasi tambah:	
Penambahan Jaringan	-
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	11.800.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(11.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	800.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp4.530.052.733)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp4.530.052.733) dan (Rp4.659.601.949). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel C.11. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.975.545.000	-	8.975.545.000
2	Peralatan dan Mesin	3.854.823.355	(3.046.508.238)	808.315.117
3	Gedung dan Bangunan	5.879.702.551	(1.472.544.495)	4.407.158.056
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	11.800.000	(11.000.000)	800.000
	Aset Tetap yang tidak digunakan	607.909.780	(606.609.780)	1.300.000

	dalam operasi pemerintahan			
Akumulasi Penyusutan		19.329.780.686	(5.136.662.513)	14.193.118.173

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.12 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp607.909.780*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp607.909.780 dan Rp14.016.444 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel C.12. Mutasi Nilai Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2024	14.016.444
Mutasi tambah:	
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	593.893.336
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 31 Desember 2025	607.909.780
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025	(606.609.780)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.300.000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(606.609.780)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing (Rp606.609.780) dan (Rp14.016.444). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas Transaksi Antar Entitas sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel C.13. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lainnya	607.909.780	(Rp606.609.780)	-
Jumlah	607.909.780	(Rp606.609.780)	-

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp579.708.551*

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp dan Rp33.286.985 dan. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.14. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan	577.651.440	Uang Jaminan Lelang yang belum diambil dan Dana yang masih dalam proses identifikasi dan konfirmasi
Belanja Langganan Listrik	-	Pemakaian listrik bulan Desember 2025
Belanja Langganan Telepon	721.744	Pemakaian Telepon bulan Desember 2025
Belanja Langganan Air	814.500	Pemakaian Air bulan Desember 2025
Belanja Pengiriman Surat Pos	520.867	Biaya Pengiriman surat dinas bulan Desember 2025
Total	579.708.551	

*Utang yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.15 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak lain dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang yang belum ditagihkan pada KPKNL Tasikmalaya berupa kuitansi UP yang belum di-SPM-kan per 31 Desember 2025. Adapun rincian Utang yang Belum Ditagihkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.15. Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang yang belum ditagihkan	-	kuitansi UP yang belum di-SPM-kan per 31 Desember 2025
Total	-	

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp200.000*

C.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp200.000 dan Rp0. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima di Kas Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut. Adapun rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel C.16. Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Diterima Dimuka	200.000	Pendapatan diterima di muka atas sewa sebagian gedung untuk kantin
Total	200.000	

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

*Ekuitas
Rp14.275.730.127*

C.19 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.275.730.127 dan Rp14.201.558.476. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO. Beban. dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan PNB
Rp5.594.784.637

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.594.784.637 dan Rp5.780.726.313. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel D.1. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
S.D. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	4.932.224.455	4.982.857.779	-1,02%
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	563.914.922	700.260.273	-19,47%
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	13.118.837	11.268.829	16,42%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	4.040.063	-	100%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	85.338.000	(100%)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.001.432	(100%)
Jumlah	5.594.784.637	5.780.726.313	(3,22%)

Pendapatan dari dan Pengelolaan Keuangan berasal dari biaya pengurusan piutang negara. bea lelang atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Tasikmalaya dan bea lelang pegadaian.

Terdapat selisih sebesar Rp80.722.360 antara nilai pendapatan PNB pada Laporan Operasional (basis akrual) dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (basis kas).

Pendapatan Bea Lelang Kelas I pada Laporan Operasional sebesar Rp5.013.610.815 dan sebesar Rp4.931.870.455 pada Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian atas pendapatan negara bukan pajak yang diakui secara akrual pada awal dan akhir tahun 2025 sebagai penambah/pengurang nilai pada Laporan Operasional atas pendapatan PNBP Pejabat Lelang Kelas I pada akhir tahun 2025.

Penyesuaian pengakuan pendapatan dilakukan atas transaksi lelang yang telah dilakukan pada akhir 2024 namun pelunasannya baru dilaksanakan pada awal Januari 2025 dan pelaksanaan lelang pada akhir tahun 2025 namun pelunasannya baru dilaksanakan pada awal Januari 2025. Rincian atas selisih pendapatan sebagai berikut:

*Tabel D.1.a. Rincian Selisih Pendapatan Negara Bukan Pajak
LO-LRA*

No.	Uraian	Nilai
Penyesuaian pada awal tahun 2025		
1.	Bea lelang PL I atas lelang yang dilakukan tahun akhir tahun 2024 namun PNBP-nya baru disetorkan pada awal 2025-tercatat sebagai pendapatan 2025 pada basis kas.	(161.000)
2.	PNBP atas hasil lelang BMN	(818.000)
3.	Pendapatan diterima di muka akhir tahun 2025	(200.000)
Penyesuaian pada akhir tahun 2025		
2.	Bea lelang PL I atas lelang yang dilakukan tahun akhir tahun 2025 namun PNBP-nya baru disetorkan pada awal 2025-tercatat sebagai penambah pendapatan 2025 pada basis akrual	80.722.360
Selisih Pendapatan pada LO-LRA		80.722.360

*Beban Persediaan
Rp103.043.586*

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp103.043.586 Rp158.501.385. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.2. Rincian Beban Persediaan
S.D. 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	103.043.586	158.501.385	34,99%
Jumlah	103.043.586	158.501.385	34,99%

Nilai beban persediaan pada Laporan Operasional (basis akrual) tidak sama dengan nilai realisasi belanja persediaan konsumsi pada Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar Rp102.858.555. hal ini disebabkan terdapat perbedaan pengertian persediaan konsumsi pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran. Beban persediaan konsumsi pada Laporan Operasional merupakan **nilai pemakaian** barang persediaan sampai dengan akhir tahun 2025 sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan **nilai dari belanja** barang persediaan sampai dengan akhir tahun 2025.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.036.568.108*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.036.568.108 dan Rp1.099.409.491. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.3. Rincian Beban Barang dan Jasa
S.D. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	S.D. 31 DESEMBER 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	735.475.142	673.724.249	9,17%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	17.574.158	35.244.996	(50,14%)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.540.667	18.533.870	(48,52%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124.130.000	74.112.000	67,49%

Beban Barang Operasional Lainnya	20.475.000	11.310.000	81,03%
Beban Bahan	9.939.700	56.457.800	(82,39%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	44.475.000	64.551.460	(31,10%)
Beban Langganan Listrik	-	125.539.656	(100%)
Beban Langganan Telepon	8.181.831	23.279.572	(64,85%)
Beban Langganan Air	12.371.700	13.762.950	(10,11%)
Beban Sewa	50.504.910	-	100%
Beban Jasa Profesi	3.900.000	-	100%
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	2.892.938	100%
Jumlah Belanja	1.036.568.108	1.099.409.491	(5,20%)

Nilai beban barang dan jasa pada Laporan Operasional (basis akrual) terdapat selisih sebesar Rp2.310.395 dengan nilai realisasi belanja barang operasional/non operasional dan jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar Rp1.038.878.503. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian atas belanja barang dan jasa yang diakui secara akrual di akhir tahun 2025 sebagai penambah nilai di laporan Operasional sebesar Rp2.057.111 dan penyesuaian di awal tahun 2025 sebagai pengurang nilai di Laporan Operasional sebesar Rp4.367.506 sebagai berikut:

*Tabel D.3.a. Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa
LO-LRA*

No.	Uraian	Nilai
Penyesuaian pada awal tahun 2025		(4.367.506)
1.	Tagihan Telepon Desember 2025	(328.568)
2.	Tagihan Air Desember 2025	(1.146.000)
3.	Tagihan Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(2.892.938)
Penyesuaian pada akhir tahun 2025		2.057.111
1.	Tagihan Biaya Pengiriman Surat Dinas Desember 2025	520.867
2.	Tagihan Telepon Desember 2025	721.744
3.	Tagihan Air Desember 2025	814.500
Selisih Beban Barang dan Jasa pada LO-LRA		2.310.395

*Beban Pemeliharaan
Rp621.776.489*

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp621.776.489 Rp474.290.510. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.4. Rincian Beban Pemeliharaan
S.D. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2024*

URAIAN	S.D. DESEMBER 2025	S.D. DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	378.368.853	254.582.632	48,62%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	243.407.636	219.707.878	10,79%
Jumlah Belanja	621.776.489	474.290.510	31,10%

Nilai beban pemeliharaan pada Laporan Operasional (basis akrual) sama dengan nilai realisasi belanja pemeliharaan pada Laporan realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar Rp621.776.489. hal ini disebabkan karena tidak terdapat penyesuaian atas belanja pemeliharaan yang diakui secara akrual di awal dan di akhir tahun 2025.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp369.693.682*

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp369.693.682 dan Rp384.804.971. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.5. Rincian Beban Perjalanan Dinas
S.D. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	S.D. DESEMBER 2025	S.D. DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Biasa	334,796,682	347.849.971	28.76%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	34,897,000	36.955.000	42.49%
Jumlah Belanja	369.693.682	384.804.971	29.96%

Nilai beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional (basis akrual) sama dengan nilai realisasi belanja pemeliharaan pada Laporan realisasi Anggaran (basis kas) yaitu sebesar Rp369.693.682. hal ini disebabkan karena tidak terdapat penyesuaian atas belanja pemeliharaan yang diakui secara akrual di awal dan di akhir tahun 2025.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp477.060.564*

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp477.060.564 dan Rp462.334.396. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan dalam tabel berikut:

*Tabel D.6. Rincian Penyusutan dan Amortisasi
S.D. 31 Desember TA 2025 dan 31 Desember 2024*

URAIAN	S.D. DESEMBER 2024	S.D. DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	200.781.888	184.736.483	8,69%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	275.628.676	277.597.913	(0,71%)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional	650.000	-	100%
Jumlah Belanja	477.060.564	462.334.396	3,19%

*Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp818.000*

D.7 Kegiatan Non Operasional

Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp818.000 dan Rp85.338.000.

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 adalah Pelepasan Aset Non Lancar.

*Tabel D.7. Rincian Kegiatan Non Operasional
S.D. 31 Desember TA 2024 dan 31 Desember TA 2024*

URAIAN	S.D. 31 Desember 2025	S.D. 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	818.000	85.338.000	(99,04%)
Jumlah	818.000	85.338.000	(99,04%)

D.8 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas satuan kerja adalah kekayaan bersih satuan kerja yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Ekuitas Awal

Rp14.201.558.476

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.201.558.476 dan Rp13.285.317.896.

Surplus/Defisit LO

Rp2.987.460.208

E.2 Surplus /Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.987.460.208 dan Rp3.201.385.560. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Koreksi Yang

Menambah/

Mengurangi Ekuitas

Rp3.038

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas berupa koreksi nilai aset non revaluasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.038 dan (Rp4.048.125). Nilai Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada Tahun 2025 ini adalah koreksi atas selisih nilai beban utilitas pemakaian bulan Desember 2024 dan dibayar pada bulan Januari 2025.

Transaksi Antar

Entitas

(Rp2.281.096.855)

E.4 Transaksi Antar Entitas Aset

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp2.281.096.855) dan (Rp836.426.387)

Ekuitas Akhir

Rp14.275.730.127

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.275.730.127 dan Rp14.201.558.476.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain dalam laporan keuangan ini.

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Pendapatan
3. Laporan Realisasi Belanja
4. Laporan Neraca
5. Laporan Neraca Percobaan Akrua
6. Laporan Neraca Percobaan Kas
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Laporan BMN Gabungan
10. Laporan BMN Intrakomptable
11. Laporan BMN Ekstrakomptable
12. Laporan Penyusutan BMN Intrakomptable
13. Laporan Penyusutan BMN Ekstrakomptable
14. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
15. Laporan Posisi BMN di Neraca
16. Laporan Persediaan
17. Laporan CRBMN Kuasa Pengguna Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel
18. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
19. Laporan Saldo Kas Bendahara Penerimaan
20. Rekening Koran Lelang Bendahara Penerimaan
21. Rekening Koran Piutang Negara Bendahara Penerimaan
22. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
23. Rekening Koran Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran
24. Rekening Koran Rekening Penampungan Tukin Bendahara Pengeluaran
25. Berita Acara Stock opname Persediaan
26. Berita Acara Rekonsiliasi PNBPN Bea Lelang
27. Berita Acara Rekonsiliasi PNBPN Biad Piutang Negara
28. Memo Penyesuaian
29. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan